

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Keberadaan hutan mempunyai manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Hal tersebut terbukti dalam kehidupan pra modern yaitu hutan merupakan tumpuan bagi pemenuhan kebutuhan manusia baik pangan, sandang maupun papan. Setelah berkembangnya kehidupan manusia, hutan memiliki perubahan manfaat. Adapun manfaat hutan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu manfaat ekologi, manfaat sosial dan manfaat ekonomi. Hutan untuk menjaga keberlangsungan keragaman hayati, serta menjaga "kelanggengan" air tanah merupakan manfaat ekologi yang berguna bagi lingkungan di sekitarnya. Sedangkan manfaat sosial hutan adalah sebagai lahan yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun manfaat ekonomi hutan adalah untuk menghasilkan keuntungan finansial dari perdagangan hasil hutan seperti kayu. Berdasarkan manfaatnya, maka dapat disimpulkan bahwa hutan merupakan kekayaan alam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat luas. Berdasar Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hutan termasuk dalam kekayaan Negara yang dilindungi oleh negara dan dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam mengelola hutan di Jawa, pemerintah menyerahkan kewenangan pengelolaan hutan kepada Djawatan Kehutanan Indonesia yang selanjutnya diganti nama menjadi Perum Perhutani. Wilayah pengelolaan hutan Perum Perhutani mencakup 3 unit pengelolaan yaitu Unit I Perum Perhutani Jawa Tengah, Unit II Perum Perhutani Jawa Timur, dan

Unit III Perum Perhutani Jawa Barat. Hutan yang dikelola Perum Perhutani adalah wilayah hutan negara seluas 2.552.733 hektar, baik dalam bentuk hutan produksi maupun hutan lindung dengan tanaman kayu jati maupun non jati.

Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi mandat untuk mengelola hutan negara dituntut untuk memberikan perhatian lebih terhadap masalah sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang sebagian besar tinggal di sekitar hutan. Interaksi antara masyarakat dengan hutan tidak mungkin dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peduli dengan masyarakat miskin di sekitar hutan. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan. Adanya program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani maka manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan dengan keberadaan hutan, dan utamanya adalah kepentingan masyarakat sekitar hutan. Hal tersebut dikarenakan pertanggung jawaban perusahaan salah satunya harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitar perusahaan (Susanto, 2012).

Sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pertama kali dicanangkan oleh Perum Perhutani pada tahun 2001 yang membuka kesempatan bagi masyarakat desa hutan untuk terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan hutan. Saat ini pedoman pelaksanaan program tersebut mengacu pada SK Direksi Perum Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan

Sumber daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Agar kegiatan PHBM dapat lebih terkoordinir, maka masyarakat desa hutan dihipunkan dalam suatu lembaga yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang dibentuk oleh Perum Perhutani yang menjadi mitra kerja dengan masyarakat desa yang berada didalam atau disekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumber daya hutan, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumber daya hutan (Awang et al, 2008).

Dengan adanya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Perum Perhutani maka masyarakat sekitar hutan dapat memperoleh manfaat secara ekonomi yaitu berupa pemenuhan kebutuhan, peningkatan pendapatan serta kesejahteraan. Dalam kegiatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) masyarakat memperoleh pekerjaan dan mendapatkan upah yang sesuai dengan sistem pembayaran yang ada di masyarakat. Berdasarkan pemaparan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) terhadap kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan (MDH) Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tentang “Peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) terhadap kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan (MDH)

Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep”, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) terhadap kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan (MDH) Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Perum Perhutani terhadap kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan (MDH) Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap berbagai pihak, di antaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah, dapat memperoleh informasi tentang peran Perum Perhutani terhadap masyarakat sekitar hutan sehingga dapat menjadi sumber penentuan kebijakan yang tepat dalam pelaksanaannya
2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dapat memperoleh gambaran mengenai peran perusahaan terhadap masyarakat sekitar hutan yang dapat memberikan dampak positif bagi keberlangsungan perusahaan
3. Perusahaan, dapat memperoleh gambaran pentingnya peran sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan

4. Penulis, dapat menerapkan teori yang telah diterima selama kuliah dan mendokumentasikan secara sistematis pengalaman yang diperoleh selama melakukan penelitian
5. Masyarakat, memperoleh gambaran tentang peran perusahaan dan masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan tersebut serta dapat digunakan untuk bahan penelitian yang lebih lanjut